



**KLIPING DIGITAL
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBIAYAAN
INFRASTRUKTUR
PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN**

17 – 18 Maret 2022



KLIPING BERITA DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

18 / 03 / 2022

Analisis Pemberitaan Media Online

| NO | ANALISIS | | TONE |
|----|-------------------|--|------|
| 1 | TANGGAL | Kamis, 17 Maret 2022 | + |
| | MEDIA | https://www.rumah.com/berita-properti/2022/3/204100/selain-salurkan-200-ribu-kpr-subsidi-bp-tapera-juga-harus-salurkan-skema-pembiayaan-lain-sebanyak-100-ribu | |
| | JUDUL | Selain Salurkan 200 Ribu KPR Subsidi, BP Tapera Juga Harus Salurkan Skema Pembiayaan Lain Sebanyak 100 Ribu | |
| | NARASUMBER | Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Hadiyanto | |
| | RESUME | BP Tapera merupakan lembaga operator investasi pemerintah (OIP) yang harus menyalurkan dana KPR subsidi FLPP sebesar 200 ribu unit pada tahun ini. Selain itu BP Tapera juga harus menyalurkan pembiayaan lain yaitu pembangunan maupun renovasi rumah sebesar 100 ribu unit. Menurut Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Hadiyanto, untuk mewujudkan tujuan investasi pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi hasil, BP Tapera dituntut untuk bekerja atas dasar tiga sasaran strategis dan enam indikator kinerja utama. | |
| 2 | TANGGAL | Kamis, 17 Maret 2022 | + |
| | MEDIA | https://www.timesindonesia.co.id/read/news/401372/kementerian-pupr-ajak-pengembang-garap-pasar-milenial | |
| | JUDUL | Kementerian PUPR Ajak Pengembang Garap Pasar Milenial | |
| | NARASUMBER | Staf Khusus Menteri Bidang Perumahan Kementerian PUPR Iskandar Saleh Deputi Komisioner Bidang Hukum dan Administrasi BP Tapera Nostra Tarigan | |
| | RESUME | Staf Khusus Menteri Bidang Perumahan Kementerian PUPR Iskandar Saleh mengatakan, dalam RPJMN 2020-2024, pemerintah menargetkan pengurangan backlog dari semula 11 juta unit menjadi 6,7 juta unit. Untuk tahun ini, sasaran itu dijabarkan dalam sejumlah program diantaranya program FLPP 200 | |



KLIPING BERITA DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

18 / 03 / 2022

Analisis Pemberitaan Media Online

| | | | |
|---|--|--|---|
| | | ribu unit, SBUM 200 ribu unit, BP2PT 312 unit, program BP Tapera 100 ribu unit, dan program dari SMF 10 ribu unit. Sementara itu, Deputi Komisioner Bidang Hukum dan Administrasi BP Tapera Nostra Tarigan meyakinkan sektor properti dapat menjadi lokomotif Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), pasalnya setiap aktivitas properti akan berdampak/ berpengaruh pada 174 sektor lainnya. Kemudian tenaga kerja yang terlibat di sektor properti dapat menyerap 30 juta tenaga kerja. Lalu setiap tambahan Rp1 yang dikeluarkan untuk sektor properti akan menciptakan output ekonomi sebesar Rp1,91. | |
| 3 | TANGGAL MEDIA JUDUL NARASUMBER RESUME | <p>Kamis, 17 Maret 2022</p> <p>https://www.kompas.com/properti/read/2022/03/17/130000321/apa-bedanya-kpr-flpp-dan-bp2bt-cari-tahu-di-sini?page=all</p> <p>Apa Bedanya KPR FLPP dan BP2BT? Cari Tahu di Sini</p> <p>-</p> <p>Pemerintah memberikan kemudahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) supaya bisa mendapatkan rumah terjangkau melalui fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi. Ada beberapa KPR subsidi yang ditawarkan mulai dari Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) hingga Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT). Manfaat yang diberikan FLPP adalah suku bunga paling tinggi berkisar 5 persen per tahun (efektif atau anuitas) dengan masa subsidi beserta dan jangka waktu KPR paling lama 20 tahun. Soal uang muka, masyarakat juga bisa mengajukan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) bersamaan dengan KPR FLPP. Sehingga, nantinya masyarakat juga akan memperoleh SBUM sebanyak Rp 4 juta. Besaran dana BP2BT yang diberikan kepada penerima ditentukan dari penghasilan kelompok sasaran dan nilai rumah atau Rencana Anggaran biaya (RAB) dengan nilai minimal Rp 21,4 juta dan maksimal Rp 32,4 juta. Perihal besaran uang muka untuk kepemilikan rumah yang diberikan BP2BT, paling sedikit 20 persen dan paling banyak 50 persen.</p> | + |
| 4 | TANGGAL | Kamis, 17 Maret 2022 | + |



KLIPING BERITA DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

18 / 03 / 2022

Analisis Pemberitaan Media Online

| | | | |
|---|-------------------|--|---|
| | MEDIA | https://pontianakpost.jawapos.com/metropolis/17/03/2022/khairiana-pimpin-dpd-apersi-kalbar-tantangan-sediakan-rumah-di-era-digital/ | |
| | JUDUL | Khairiana Pimpin DPD Apersi Kalbar, Tantangan Sediakan Rumah di Era Digital | |
| | NARASUMBER | Khairiana, Ketua DPD Apersi Kalbar | |
| | RESUME | Pembiayaan Perumahan MBR tahun 2022 ini, BP Tapera menyediakan FLPP bagi MBR berpenghasilan tetap, BP2BT untuk MBR berpenghasilan tak tetap dan Bapera bagi MBR yang berpenghasilan tak tetap dan tetap. Jadi semua masyarakat berkesempatan dapat pembiayaan perumahan | |
| 5 | TANGGAL | Kamis, 17 Maret 2022 | |
| | MEDIA | https://bisnis.tempo.co/read/1571921/kementerian-pupr-bangun-spam-semarang-barat-berkapasitas-1-000-liter-per-detik | |
| | JUDUL | Kementerian PUPR Bangun SPAM Semarang Barat Berkapasitas 1.000 Liter per Detik | |
| | NARASUMBER | Menteri PUPR Basuki Hadimuljono | |
| | RESUME | Jakarta -Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR tengah membangun Sistem Penyediaan Air Minum atau SPAM Semarang Barat sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) di Provinsi Jawa Tengah. Sumber air baku SPAM Semarang Barat berasal dari Bendungan Jatibarang yang disalurkan melalui jaringan perpipaan air baku sepanjang 2500 meter dan jaringan perpipaan distribusi (utama dan pembagi) sepanjang 53.500 meter. SPAM Semarang Barat direncanakan memiliki kapasitas 1.000 liter per detik yang dapat melayani 70.000 sambungan rumah (SR) atau 350.000 jiwa. Kehadiran SPAM diharapkan dapat menjawab permasalahan krisis air bersih dan penurunan permukaan tanah karena penggunaan air tanah di Kota Semarang. Proyek yang dimulai pada 4 November 2021 ini ditargetkan rampung pada 28 Desember 2022. SPAM Semarang Barat merupakan <i>pilot project</i> pembangunan SPAM dengan skema pendanaan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) di Indonesia dengan anggaran Rp 1,4 triliun. Dari sumber dana APBN Rp 227,9 miliar dan dari non APBN Rp 1,19 triliun. | + |



17 / 03 / 2022

| Sumber: rumah.com

Selain Salurkan 200 Ribu KPR Subsidi, BP Tapera Juga Harus Salurkan Skema Pembiayaan Lain Sebanyak 100 Ribu

Author: Wahyu Ardiyanto

RumahCom – BP Tapera merupakan lembaga operator investasi pemerintah (OIP) yang harus menyalurkan dana KPR subsidi FLPP sebesar 200 ribu unit pada tahun ini. Selain itu BP Tapera juga harus menyalurkan pembiayaan lain yaitu pembangunan maupun renovasi rumah sebesar 100 ribu unit.

BP Tapera merupakan Operator Investasi Pemerintah (OIP) pertama yang mengimplementasikan Peraturan Pemerintah (PP) No. 63 Tahun 2019 tentang investasi pemerintah. BP Tapera merupakan lembaga yang mengutip gaji setiap pekerja untuk dikelola sebagai dana jangka panjang pembiayaan perumahan.

Pada awal tahun ini, BP Tapera juga diamanatkan untuk menyalurkan KPR subsidi fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) yang sebelumnya disalurkan oleh Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Menurut Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Hadiyanto, untuk mewujudkan tujuan investasi pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi hasil, BP Tapera dituntut untuk bekerja atas dasar tiga sasaran strategis dan enam indikator kinerja utama.

“BP Tapera harus bisa memberikan layanan prima dengan indikator kinerja realisasi penyaluran dana FLPP dan tingkat keterhunian rumahnya. Kedua, peningkatan akuntabilitas pengelolaan dana FLPP yang berkesinambungan, dan ketiga kinerja pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, dan akuntabel,” ujarnya.

Berbagai indikator lainnya yaitu BP Tapera juga harus bisa melakukan rekonsiliasi dengan bank penyalur dan penyelesaian temuan auditor. Kemudian ketepatan waktu pencairan alokasi dana sesuai dengan rencana penarikan dana dan realisasi jumlah imbal hasil dana FLPP yang disetorkan ke rekening investasi tempat penampungan dana pemerintah.

Hadiyanto juga menyebut, bila pengelolaan dana yang diatur ini bisa berjalan, selanjutnya model pengelolaan investasi dana FLPP yang dijalankan BP Tapera ini bisa dijadikan percontohan ataupun *role model* bagi investasi-investasi pemerintah lainnya. Karena itu BP Tapera harus menerapkan manajemen risiko dan pengendalian internal atas pengelolaan dana investasi pemerintah.

BP Tapera harus terus memperkuat kelembagaannya dengan menyusun maupun memperbarui kebijakan manajemen risiko, memantau dan menelaah secara berkala pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko,



KLIPING BERITA DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

17 / 03 / 2022

| Sumber: rumah.com

serta memantau posisi risiko secara keseluruhan terkait pengelolaan dana FLPP.

“Selain itu dengan banyaknya peran yang diemban BP Tapera, lembaga ini bukan hanya harus bisa mengelola dan menyalurkan dana FLPP sesuai target yang ditetapkan. Tahun ini BP Tapera ditarget menyalurkan KPR subsidi FLPP sebanyak 200 ribu unit tapi juga harus mampu

menyalurkan pembiayaan lain berupa kredit bangun rumah (KBR) dan kredit renovasi rumah (KRR) sebanyak 100 ribu unit,” bebernya.

<https://www.rumah.com/berita-properti/2022/3/204100/selain-salurkan-200-ribu-kpr-subsidi-bp-tapera-juga-harus-salurkan-skema-pembiayaan-lain-sebanyak-100-ribu>



17 / 03 / 2022

Sumber: timesindonesia.co.id

Kementerian PUPR Ajak Pengembang Garap Pasar Milenial

Pewarta: Moh Ramli
Editor: Wahyu Nurdianto

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Kementerian PUPR menilai sektor properti yang didukung dengan konsumen milenial akan semakin tumbuh positif di tahun ini.

Staf Khusus Menteri Bidang Perumahan Kementerian PUPR Iskandar Saleh mengatakan, dalam RPJMN 2020-2024, pemerintah menargetkan pengurangan backlog dari semula 11 juta unit menjadi 6,7 juta unit.

Untuk tahun ini, sasaran itu dijabarkan dalam sejumlah program diantaranya program FLPP 200 ribu unit, SBUM 200 ribu unit, BP2PT 312 unit, program BP Tapera 100 ribu unit, dan program dari SMF 10 ribu unit.

"Besaran tersebut menjadi tantangan sekaligus peluang kita bersama, untuk itu kami mengajak para pemangku kepentingan, para stakeholder sektor perumahan untuk bahu membahu saling asah, asih, asuh mencapai target yang ditetapkan pemerintah," ujarnya dalam keterangannya dikutip Kamis (17/3/2022).

Ia optimis sektor properti akan tetap tumbuh positif tahun ini dan hunian bagi generasi milenial berpotensi besar mendorong pertumbuhan sektor ini lebih tinggi lagi.

Berdasarkan survei Property Outlook 2022 yang dilakukan Knight Frank Indonesia,

menggambarkan 63% responden yang menyatakan optimis bahwa kondisi perekonomian nasional akan membaik pada 2022, demikian juga sektor properti yang diprediksi akan tumbuh lebih positif.

Kemudian terdapat beberapa tren peluang yang akan mewarnai adaptasi strategi bisnis di sektor properti tahun depan. Hal ini diantaranya adalah ekspansi data center, transformasi digital, sektor kreatif dan inovasi, logistik dan fulfillment center, preferensi rumah tapak yang masih menjadi favorit, dan dukungan sistem pembayaran properti

"Persepsi dan sentimen pasar berdasarkan hasil survey menunjukkan masih tingginya performa sektor tersebut, terutama residensial subsektor hunian tapak," jelasnya.

"Penting dicatat Indo akan mengalami bonus demografi yang terjadi pada saat jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) lebih besar dibandingkan penduduk usia nonproduktif pada tahun 2030. Pada saat tersebut generasi milenial dalam jumlah yang dominan dan menggantikan generasi X," tambahnya.

Apalagi lanjut dia, pemberian stimulus di sektor properti di tahun ini terus berlanjut seperti bantuan pembiayaan perumahan, perpanjangan fasilitas PPN DTP (diskon pajak), penetapan suku bunga acuan BI yang rendah, relaksasi LTV/ FTV (DP 0



17 / 03 / 2022

Sumber: timesindonesia.co.id

Persen), relaksasi ATR sektor properti menjadi 20-35%, dan pemberian masa transisi penerbitan Persetujuan Pembangunan Gedung (PPG) bagi Pemda yang belum memiliki perda tentang PPG.

Sementara itu, Deputy Komisioner Bidang Hukum dan Administrasi BP Tapera Nostara Tarigan meyakini sektor properti dapat menjadi lokomotif Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), pasalnya setiap aktivitas properti akan berdampak/ berpengaruh pada 174 sektor lainnya.

Kemudian tenaga kerja yang terlibat di sektor properti dapat menyerap 30 juta tenaga kerja. Lalu setiap tambahan Rp1 yang dikeluarkan untuk sektor properti akan menciptakan output ekonomi sebesar Rp1,91.

Dan setiap tambahan Rp1 pendapatan pekerja di sektor perumahan akan menciptakan tambahan pendapatan nasional sebesar Rp2.

"Jadi kalau dari dana FLPP yang kami kelola sebesar Rp23 triliun tahun ini maka kalau kita pakai asumsi ini bisa menciptakan tambahan pendapatan nasional Rp46 triliun. belum lagi nanti kalau ditambah dana tapera yang dimanfaatkan untuk pembiayaan perumahan sebesar Rp2,9 triliun. jadi kita semua sepakat bahwa bagaimana daya ungkit, multiplier effect properti sangat berpengaruh terhadap perekonomian nasional," jelasnya.

Direktur Sekuritisasi dan Pembiayaan Saran Multigriya Finansial (SMF) Heliantopo menuturkan, sektor properti adalah salah satu sektor yang tetap tumbuh di masa pandemi.

"Jadi hal ini membuktikan kebutuhan perumahan adalah basic need jadi apapun kondisinya karena ini kebutuhan dasar maka akan berusaha dipenuhi," ucapnya.

Untuk itu ada beberapa inisiatif yang telah dan akan dilakukan SMF untuk memenuhi kebutuhan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan Milenial. Inisiatif itu diantaranya adalah pembiayaan homestay dan peningkatan kualitas rumah di daerah kumuh.

"Lalu implementasi pembiayaan mikro bekerja sama dengan PNM sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan ekonomi sektor informal. Penjajakan pembiayaan KPR/KPA dan KPR Indent yang salah satunya menargetkan pasar milenial, serta kredit konstruksi kepada developer sebagai bentuk Implementasi perluasan mandat Perseroan. Dan kegiatan sekuritisasi yang didukung dengan penyaluran pembiayaan agar bank penyalur KPR dapat menyalurkan KPR nya dengan bunga yang lebih rendah," katanya.

Lebih lanjut, Director of Business Development & HCM PT PP Properti Tbk. Fajar Saiful Bahri menyampaikan, untuk memenuhi kebutuhan hunian milenial, secara konsep pihaknya membuat konsep interior yang instagramable, tropical housing, student apartment, rooftop futsal, rooftop swimming pool, stay connected (smarthome).

"PPPro juga menjangkau beberapa segmen dari middle low sampai middle up. Untuk middle low kita ada Rusunami dan landed house untuk milenial. Bahkan sandwich generation juga kita akomodir," katanya.



17 / 03 / 2022

Sumber: timesindonesia.co.id

Di sisi lain, Direktur Paramount Land M. Nawawi mengatakan, pihaknya menyiapkan Paramount Petals, sebuah kota mandiri yang dikembangkan untuk merespon pasar milenial yang akrab dengan digital.

"Kami mencatat dari 500 unit penjualan Paramount Petals terdapat 62% real pembelinya usianya milenial. Kemudian terkait perbankan, ternyata cara bayarnya 70% KPR," paparnya.

Ada beberapa yang diinginkan milenial dalam membeli rumah. Pertama, lokasi tidak harus di tengah kota yang penting ada aksesibilitas dan terjangkau. Kedua, karakteristik milenial senang konsep terbuka. Ketiga, rumah yang cerdas dan lingkungan yang cerdas, fasilitas hospital, sekolah TK, SD itu sangat penting. "Ini menjadi catatan betapa pentingnya fasilitas bagi milenial karena mereka memiliki anak yang masih kecil-kecil," tambahnya.

Wakil Direktur Utama Perum Perumnas Oni Febriarto Rahardjo mengungkapkan,

milenial memang menjadi target Perumnas. Pasalnya bila melihat potensial buyer, ada 81 juta milenial yang belum memiliki rumah di tahun 2019.

"(Terkait harga) dari sisi milenial, dia affordable di angka Rp200 juta sampai Rp400 juta. Di kami 50% itu milenial. jadi yang bisa mendorong sektor properti ini memang milenial," katanya.

Tak ketinggalan Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia (REI) Paulus Totok Lusida menyampaikan, kontribusi sektor properti untuk pembangunan nasional sangatlah besar.

"Kita itu terhadap PDB sebagaimana disampaikan pak Presiden Joko Widodo di rakernas REI adalah 13,6 persen terhadap PDB," ujarnya.

<https://www.timesindonesia.co.id/read/news/401372/kementerian-pupr-ajak-pengembang-garap-pasar-milenial>



17 / 03 / 2022

Sumber: [kompas.com](https://www.kompas.com)

Apa Bedanya KPR FLPP dan BP2BT? Cari Tahu di Sini

Penulis: Suhaiela Bahfein
Editor: Hilda B Alexander

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah memberikan kemudahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) supaya bisa mendapatkan rumah terjangkau melalui fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi.

Ada beberapa KPR subsidi yang ditawarkan mulai dari Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) hingga Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT).

Namun, sebelum mengetahui apa itu KPR FLPP maupun BP2BT, ketahui terlebih dahulu definisi dari KPR itu sendiri.

KPR didefinisikan sebagai kredit atau pembiayaan pemilikan rumah yang diterbitkan oleh bank pelaksana.

Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri (Permen) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 20/PRT/M/2019 tentang Kemudahan dan Bantuan Pemilikan Rumah bagi MBR.

Kemudian, Pasal 1 ayat 2, KPR bersubsidi adalah kredit atau pembiayaan pemilikan rumah yang mendapat bantuan dan/atau kemudahan pemilikan rumah dari Pemerintah, khususnya bagi MBR.

Lantas, bagaimana dengan KPR FLPP dan BP2BT?

FLPP

Ini merupakan jenis KPR subsidi yang cukup populer di kalangan masyarakat dan pengelolaannya dilaksanakan oleh Kementerian PUPR.

FLPP bertujuan untuk menyediakan dana dalam mendukung KPR sederhana sehat bagi MBR untuk memperoleh rumah umum tapak dan satuan rumah susun (sarusun) umum melalui KPR Sejahtera.

Dana FLPP ini kemudian disalurkan kepada kelompok sasaran KPR Sejahtera melalui bank pelaksana.

Penyalurannya dilakukan menggunakan pola risiko ketidaktertagihan dana FLPP ditanggung oleh bank pelaksana (executing).

Manfaat yang diberikan FLPP adalah suku bunga paling tinggi berkisar 5 persen per tahun (efektif atau anuitas) dengan masa subsidi beserta dan jangka waktu KPR paling lama 20 tahun.

Selanjutnya, nilai angsuran terjangkau, bebas premi asuransi dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), beserta down payment (DP) atau uang muka ringan.

Soal uang muka, masyarakat juga bisa mengajukan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) bersamaan dengan KPR FLPP.



17 / 03 / 2022

Sumber: [kompas.com](https://www.kompas.com)

Sehingga, nantinya masyarakat juga akan memperoleh SBUM sebanyak Rp 4 juta.

Besaran ini sesuai yang tertera dalam Keputusan Menteri (Kepmen) PUPR Nomor 242/KPTS/M/2020 tentang Batasan Penghasilan Kelompok Sasaran Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Bersubsidi.

BP2BT

Selain FLPP, terdapat jenis KPR subsidi yang bisa dikategorikan dalam KPR Non-FLPP, seperti halnya BP2BT.

Melansir dari laman Direktorat Jenderal (Ditjen) Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR, BP2BT adalah program bantuan pemerintah yang diberikan kepada MBR yang telah mempunyai tabungan.

Ini dilakukan dalam rangka pemenuhan sebagian uang muka perolehan rumah atau sebagian dana untuk pembangunan rumah swadaya melalui kredit atau pembiayaan bank pelaksana.

Dana BP2BT adalah bantuan pemerintah yang diberikan satu kali untuk pembayaran uang muka atas pembelian rumah atau sebagian biaya atas pembangunan rumah swadaya.

Besaran dana BP2BT yang diberikan kepada penerima ditentukan dari penghasilan kelompok sasaran dan nilai rumah atau Rencana Anggaran biaya (RAB) dengan nilai minimal Rp 21,4 juta dan maksimal Rp 32,4 juta.

Batasan penghasilan kelompok sasaran BP2BT terbagi menjadi tiga zona wilayah yang didasari penghasilan per bulannya.

Untuk Zona I terdiri dari Sumatera, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Sulawesi, dan Jawa, kecuali Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek).

Untuk kepemilikan dalam membeli rumah tapak maksimal penghasilannya Rp 6 juta per bulan. Sedangkan rusun dengan penghasilan maksimal Rp 7 juta per bulan.

Kemudian Zona II yaitu Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, Maluku Utara, dan Jabodetabek memiliki penghasilan maksimal Rp 6 juta per bulan untuk kepemilikan rumah tapak.

Sementara kepemilikan rusun dengan penghasilan maksimal Rp 7,5 juta per bulan. Sementara Zona III, Papua dan Papua Barat, masyarakat harus memiliki penghasilan maksimal Rp 6,5 juta per bulan untuk kepemilikan rumah tapak. Sedangkan rusun dengan penghasilan maksimal Rp 8,5 juta per bulan.

Perihal besaran uang muka untuk kepemilikan rumah yang diberikan BP2BT, paling sedikit 20 persen dan paling banyak 50 persen.

Salah satu bank pelaksana yang menjalin kerja sama dengan Pemerintah dalam hal fasilitas KPR BP2BT adalah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN.

Mengutip laman BTN, suku bunga yang ditawarkan sebesar 10 persen untuk tahun pertama, kemudian tahun kedua sebesar 11 persen, dan tahun ketiga sebesar 12 persen.



KLIPING BERITA DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

17 / 03 / 2022

| Sumber: [kompas.com](https://www.kompas.com)

Sementara untuk tahun keempat, suku bunga mengambang denga tetap memperhatikan batas tertinggi yang ditetapkan pemerintah. Untuk jangka waktunya selama 20 tahun dengan bebas premi dan PPN.

<https://www.kompas.com/properti/read/2022/03/17/130000321/apa-bedanya-kpr-flpp-dan-bp2bt-cari-tahu-di-sini?page=all>



17 / 03 / 2022

Sumber: jawapos.com

Khairiana Pimpin DPD Apersi Kalbar, Tantangan Sediakan Rumah di Era Digital

Editor : Syahriani Siregar

PONTIANAK – Tampuk kepemimpinan DPD Apersi (Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia) Kalimantan Barat kembali dipimpin Khairiana Amd untuk periode 2022-2026. Pemilihan dilaksanakan pada Musyawarah Daerah (Musda) VI DPD Apersi Kalbar di Hotel Orchard Perdana, Selasa (15/03/2022).

“Saya berterima kasih kepada para *developer* anggota DPD Apersi yang kembali mempercayai memimpin. Dengan dukungan semua pihak kami bertekad untuk mengembangkan organisasi ini lebih baik. Memperjuangkan kepentingan anggota dalam membangun perumahan dan bekerjasama berbagai pihak, pemerintah serta mitra untuk memajukan dunia properti di Kalimantan Barat,” ujar Khairiana, Ketua DPD Apersi Kalbar usai terpilih periode 2022-2026, kemarin.

Pelaksanaan Musda berlangsung demokratis. Dua calon terbaik dari Pengurus DPD Apersi Ikut bertanding. Tabrani ST dan Khairiana Amd. Tabrani merupakan penantang dari Petahana Khairiana. Dia merupakan pengurus inti DPD Apersi Kalbar selama dua periode.

Sedangkan Khairiana sebagai Ketua Umum DPD Apersi Kalbar 2018-2022. Sebelum pemungutan suara dilaksanakan, pemaparan visi dan misi disampaikan di hadapan peserta musda. Sekira 137 pimpinan perusahaan yang tergabung dalam DPD Apersi Kalbar hadir. Namun

yang berhak memilih dan dipilih hanya anggota yang saat itu tercatat aktif, sekira 82 perusahaan.

Prosesi persidangan mengikuti AD/ART organisasi yang disaksikan langsung oleh DPD Apersi pusat, berjalan demokratis. Voting suara menghasilkan, 63 persen memilih Khairiana dan 37 persen suara memilih Tabrani. Usai pemilihan, tim formatur dibentuk dan langsung menyusun pengurus. Pelantikan pengurus DPD Apersi Kalbar periode 2022-2026 dilakukan saat itu juga oleh Ketua DPD Apersi pusat H. Junaidi Abdillah, SE, MM.

“Pelaksanaan Musda VI DPD Apersi Kalbar berjalan demokratis dan sukses. Kami berharap para pengembang di daerah ini lebih semangat lagi menyediakan perumahan MBR. Karena backlog perumahan Indonesia masih tinggi. Untuk Kalbar dari data BP tapera, tahun ini masih sekira 118.753 yang belum miliki rumah. Mitra perbankan juga dapat mempermudah konsumen dan pengembang dalam merealisasikan akad kredit,” kata Junaidi Abdillah yang juga mantan Ketua DPD Apersi Kalbar.

Musda dibuka Gubernur Kalbar yang diwakili Hendra Bachtiar ST, MT selaku Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Provinsi Kalbar. Gubernur Sutarmidji berhalangan hadir karena diwaktu bersamaan, sedang berada di Kalimantan Timur bersama Presiden RI Joko Widodo. Saat pembukaan Musda juga



17 / 03 / 2022

Sumber: jawapos.com

dilakukan perjanjian kerjasama, PKS massal antara Bank BRI Gajahmada Pontianak dengan para Developer aktif anggota DPD Apersi Kalbar.

Diskusi panel juga digelar. Membahas tentang peran Apersi dalam penyediaan perumahan rakyat di Kalbar pada era digital. Para Panelis yang dihadirkan, Alfian Arif dari BP Tapera, Kurniawan Dwi Saputra Pimpinan Bank BRI Gajahmada Pontianak, Fikri Gozali Pimpinan Bank BTN Pontianak, Abdurahman dari Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Kalimantan I PUPR, Maria Agustina dari Dinas penanaman Modal dan PTSP Kubu Raya dan Rizal Ashari dari PLN Wilayah Kalimantan Barat.

Salah satu materi menarik dari BP Tapera. Tapera bertujuan untuk menghimpun dan

menyediakan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan untuk pembiayaan perumahan dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau.

“Pembiayaan Perumahan MBR tahun 2022 ini, BP Tapera menyediakan FLPP bagi MBR berpenghasilan tetap, BP2BT untuk MBR berpenghasilan tak tetap dan Bapera bagi MBR yang berpenghasilan tak tetap dan tetap. Jadi semua masyarakat berkesempatan dapat pembiayaan perumahan,” papar Alfian.

<https://pontianakpost.jawapos.com/metropolis/17/03/2022/khairiana-pimpin-dpd-apersi-kalbar-tantangan-sediakan-rumah-di-era-digital/>



17 / 03 / 2022

Sumber: tempo.co

Kementerian PUPR Bangun SPAM Semarang Barat Berkapasitas 1.000 Liter per Detik

Reporter: Mutia Yuantisya
Editor: Martha Warta Silaban

TEMPO.CO, Jakarta -Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau [PUPR](#) tengah membangun Sistem Penyediaan Air Minum atau SPAM Semarang Barat sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) di Provinsi Jawa Tengah.

“Layanan [SPAM](#) diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan domestik agar masyarakat menikmati air minum berkualitas dengan harga terjangkau, berkesinambungan selama 24 jam, serta meningkatkan perbaikan kesehatan masyarakat yang berhubungan dengan air bersih,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dalam keterangannya Kamis, 17 Maret 2022.

Sumber air baku SPAM Semarang Barat berasal dari Bendungan Jatibarang yang disalurkan melalui jaringan perpipaan air baku sepanjang 2500 meter dan jaringan perpipaan distribusi (utama dan pembagi) sepanjang 53.500 meter.

SPAM Semarang Barat direncanakan memiliki kapasitas 1.000 liter per detik yang dapat melayani 70.000 sambungan rumah (SR) atau 350.000 jiwa. Kehadiran SPAM diharapkan dapat menjawab permasalahan krisis [air bersih](#) dan penurunan permukaan tanah karena penggunaan air tanah di Kota Semarang.

Proyek yang dimulai pada 4 November 2021 ini ditargetkan rampung pada 28

Desember 2022. SPAM Semarang Barat merupakan *pilot project* pembangunan SPAM dengan skema pendanaan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) di Indonesia dengan anggaran Rp 1,4 triliun. Dari sumber dana APBN Rp 227,9 miliar dan dari non APBN Rp 1,19 triliun.

Progres konstruksi dengan sumber dana APBN saat ini mencapai 11,01 persen, sementara pekerjaan konstruksi dengan sumber dana non APBN sudah rampung sejak Mei 2021. Di samping SPAM Semarang Barat, di Provinsi Jawa Tengah Kementerian PUPR juga membangun SPAM Regional Wosusokas di Kabupaten Wonogiri.

Sumber air baku SPAM Regional Wosusokas berasal dari Waduk Gajah Mungkur yang disalurkan melalui pipa transmisi air bersih dengan 12 titik reservoir. SPAM Regional Wosusokas rencananya memiliki kapasitas 1.450 liter/detik yang dapat melayani 116.000 SR.

Kebutuhan pembiayaan pembangunan SPAM Regional Wosusokas sekira Rp 2,2 triliun dengan masa pelaksanaan konstruksi pada 2021-2024. Pembangunan SPAM dilaksanakan secara bertahap. Tahap I berkapasitas 750 liter/detik dan Tahap II berkapasitas 700 liter/detik. Progresnya saat ini tengah memasuki proses lelang.



KLIPING BERITA DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

17 / 03 / 2022

| Sumber: tempo.co

SPAM yang tengah dalam proses konstruksi adalah SPAM Lampung dengan progres fisik 84,28 persen. Sumber air baku SPAM Lampung berasal dari Sungai Way Sekampung dan Instalasi Pengolah Air (IPA).

SPAM Lampung akan menyediakan air minum 750 liter per detik untuk 60.000 SR. Nilai total investasi Rp 1,3 triliun dengan skema KPBU.

Kementerian PUPR telah menyelesaikan SPM Umbulan di Jawa Timur dan diresmikan Presiden Joko Widodo pada Maret 2021.

<https://bisnis.tempo.co/read/1571921/kementerian-pupr-bangun-spam-semarang-barat-berkapasitas-1-000-liter-per-detik>